



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jln Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi. Arfai - Manokwari. Kode Pos : 98315

Email : [dkp.papua.barat@gmail.com](mailto:dkp.papua.barat@gmail.com)

18 Maret 2021

Nomor : 005 / 216 /DKP-PB/3/2021  
Lamp. : 1 (Satu) Berkas  
Hal : Undangan

Yth. (Daftar Terlampir)  
di-  
Tempat

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengelolaan bersama perikanan (*Co-Management Fisheries*) tuna, tongkol dan cakalang di wilayah pengelolaan perikanan Provinsi Papua Barat dan meningkatkan peran dari industri didalamnya, maka kami bekerja sama dengan Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI) dan Yayasan IPNLF Indonesia (YII), mengundang Bapak/Ibu pada Pertemuan Pendahuluan Pembentukan Komite Pengelolaan Bersama Perikanan (KBPB) Tuna, Tongkol dan Cakalang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Provinsi Papua Barat yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 26 Maret 2021  
Jam : 10.00 WIT – selesai  
Lokasi : Daring (online)  
Zoom ID : 869 4587 5136  
Password : kpbppabar  
Link Zoom : <https://us02web.zoom.us/j/86945875136>

Untuk konfirmasi kehadiran dan/atau apabila ada pertanyaan lebih lanjut tentang kegiatan ini dapat menghubungi Sdr. Yonatan Ady (081233755233). Diharapkan konfirmasi kehadiran Bapak/Ibu paling lambat tanggal 23 Maret 2021.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,  
  
JACOBIS AYOMI, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19691107 199203 1 011

# Kerangka Acuan Kegiatan

## Pertemuan Pendahuluan Pembentukan Komite Pengelolaan Bersama Perikanan (KPBP) Perikanan Tuna, Tongkol dan Cakalang Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Provinsi Papua Barat Virtual Meeting, 26 Maret 2021

### I. Latar Belakang

Asosiasi Perikanan *Pole & Line* (PL) dan *Handline* (HL) Indonesia (AP2HI) lahir setelah adanya pembicaraan tentang kebutuhan wadah untuk pengembangan perikanan tuna berkelanjutan di Indonesia pada tahun 2013. AP2HI didirikan atas dasar kebutuhan para pelaku industri *Pole & Line* (PL) dan *Handline* (HL) di Indonesia untuk menyatukan suaranya di dalam suatu wadah agar dapat berusaha secara sehat dan berkelanjutan dan mempromosikan perikanan hupate dan pancing ulur sebagai salah satu alat penangkapan yang berpeluang mendapatkan sertifikat ekolabel, sosial dan sertifikat lainnya sesuai trend permintaan pasar internasional saat ini.

Ikan utama yang tertangkap dengan menggunakan alat tangkap hupate dan pancing ulur adalah ikan tuna dan cakalang. Mengingat ikan tuna dan cakalang yang menjadi target kita ini merupakan ikan target yang beruaya jauh (*highly migratory fish*) melintasi area, baik Zona Ekonomi Eksklusif dari satu atau lebih negara dan laut lepas, maka pengelolaan ikan target ini harus dilakukan melalui kerjasama secara regional dan/atau internasional. Indonesia sudah tergabung secara resmi pada keanggotaan organisasi regional dan internasional dalam rangka kerjasama pengelolaan perikanan regional dan internasional, antara lain *Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC), *Western and Central Pacific Fisheries Commission* (WCPFC) dan *Commission for The Conservation of Southern Bluefin Tuna* (CCSBT).

Pasar internasional, contohnya Uni Eropa dan Amerika Serikat, saat ini sudah mulai memperhatikan keberlanjutan dari ikan target. Selain itu, kesadaran pasar untuk memperhatikan ketertelusuran (*traceability*) produk juga menjadi sangat penting. Salah satu cara untuk menembus akses pasar internasional yaitu dengan memperoleh salah satu sertifikat ekolabel yang menjadi standar, contohnya adalah *Marine Stewardship Council* (MSC). Salah satu standar untuk mendapatkan sertifikat tersebut adalah adanya peran dari multi-stakeholder terkait untuk pengelolaan perikanan tuna dan cakalang dengan menggunakan alat tangkap hupate dan pancing ulur, terutama di area Provinsi Papua Barat. Atau biasa disebut dengan Pengelolaan Bersama Perikanan (*Fisheries Co-Management*).

Pengelolaan bersama perikanan ini sangat bermanfaat bagi pemangku kepentingan terkait karena konsep dari pengelolaan bersama mengutamakan kepentingan bersama dan dapat membangun pengelolaan yang lebih baik dan efektif. Mulai dari prinsip pengelolaan bersama, pemangku kepentingan yang dilibatkan, ruang lingkup yang akan dikerjakan. Pengelolaan bersama juga tidak terlepas dari ketersediaannya data dan informasi perikanan yang menjadi dasar pengelolaan perikanan. Dan dari sisi permintaan pasar internasional, data dan informasi ketertelusuran produk perikanan sangat dibutuhkan sebagai salah satu syarat ekspor.

Di beberapa Provinsi lainnya sebagai contoh juga telah terbentuk suatu wadah pengelolaan bersama perikanan ini berupa komite di mana para pemangku kepentingan berdiskusi mengenai tantangan yang dihadapi di perikanan mereka dan juga menyampaikan hasil pertemuan ini kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, antara lain di Provinsi Provinsi Maluku, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

## II. Tujuan Pertemuan

1. Memberikan pemahaman kepada pemangku kepentingan perikanan tuna, tongkol dan cakalang di Provinsi Papua Barat mengenai manfaat pengelolaan bersama perikanan ini berbasis data dan informasi, serta memperluas pasar penjualan produk perikanan.
2. Membagikan pengalaman (*Success Story*) kepada pemangku kepentingan perikanan tuna, tongkol dan cakalang di Provinsi Papua Barat dari anggota komite di provinsi lainnya.
3. Mengajukan komitmen dari masing-masing calon anggota komite untuk turut serta aktif dalam pengelolaan perikanan ini melalui komite yang akan dibentuk.

## III. Hasil yang Diharapkan

1. Para pemangku kepentingan perikanan tuna, tongkol dan cakalang di Provinsi Papua Barat paham akan manfaat pengelolaan bersama perikanan ini berbasis data dan informasi, serta memperluas pasar penjualan produk perikanan.
2. Para pemangku kepentingan perikanan tuna, tongkol dan cakalang di Provinsi Papua Barat mendapatkan gambaran mengenai pengelolaan bersama yang telah dilakukan oleh provinsi lainnya.
3. Para pemangku kepentingan perikanan tuna, tongkol dan cakalang di Provinsi Papua Barat memberikan komitmennya untuk turut serta aktif dalam pengelolaan perikanan ini melalui komite yang akan dibentuk.

## IV. Waktu dan Tempat

Pertemuan pendahuluan ini rencananya diadakan pada,

Hari, Tanggal : Selasa, 26 Maret 2021  
Waktu : 08.00 WIB (10.00 WIT) – selesai  
Lokasi : Virtual via aplikasi Zoom  
Link : <https://us02web.zoom.us/j/86945875136>

## V. Agenda

Jam	Deskripsi	Pembicara
07.30 – 08.00	Ruang Zoom sudah dibuka untuk pendaftaran	AP2HI
08.00 – 08.15	Pembukaan	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Papua Barat
08.15 – 08.45	Penyampaian Materi (AP2HI): "Pengelolaan Bersama Perikanan Berbasis Data dan Informasi, serta Peluang dalam Peningkatan Pasar Internasional melalui Sertifikasi Ekolabel."	Janti Djuari
08.45 – 09.15	Penyampaian Materi (PSDI-KKP): "Kelembagaan Wilayah Pengelolaan Perikanan terhadap Pengelolaan Perikanan Provinsi"	Direktorat PSDI, DJPT, KKP
09.15 – 09.45	Berbagi pengalaman (KPBP Maluku Utara)	Ketua KPBP Prov. Maluku Utara
09.45 – 10.00	Penyampaian Materi (Yayasan MDPI): "Keterkaitan Pengelolaan Perikanan Skala Provinsi untuk Pengelolaan Perikanan Skala Nasional"	Yayasan MDPI
10.00 – 10.30	Sesi Tanya Jawab	Moderator
10.30 – 11.30	<ul style="list-style-type: none"><li>• Komitmen calon anggota komite</li><li>• Pembuatan <i>timeline</i> dan rencana kerja komite</li><li>• Kesimpulan</li></ul>	Moderator

## VI. Daftar Undangan

### Pemerintah Daerah

1. DKP Provinsi Papua Barat (3 orang)
2. DKP Kota Sorong (1 orang)
3. DKP Kabupaten Sorong (1 orang)
4. DKP Kabupaten Manokwari (1 orang)
5. Ketua Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna Provinsi Maluku Utara, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara

### Pemerintah Pusat

6. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, KKP (1 orang)

### Akademisi/Universitas

7. Universitas Papua
8. Politeknik Kelautan dan Perikanan (Poltek KP) Sorong

### Industri/Pelaku Usaha Swasta

9. PT. Radios Apirja Sorong
10. PT. Citra Raja Ampat Canning
11. PT. Industri Perikanan Namatota
12. PT. Bina Nelayan Jaya

### Asosiasi dan Organisasi Lokal lainnya

13. AP2HI
14. Yayasan IPNLF Indonesia
15. Yayasan MDPI

## VII. Pembiayaan

Pertemuan ini akan diadakan secara daring (*online*) melalui aplikasi Zoom. Namun, khusus untuk pemangku kepentingan dengan kategori Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, serta Akademisi/Universitas akan diberikan Perdiem berdasarkan ketentuan AP2HI.